

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Rizki Awalia Rahman¹, Siti Raudah², Selamat Riadi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : rizkyrahman418@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan berkaitan dengan implementasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan meliputi Ketidaksesuaian Target dan Realisasi Luasan Tanam, Sumber daya yang kurang memadai, Komunikasi yang kurang optimal antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara *Snowball Sampling*, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan implementasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tergolong kurang baik dilihat dari beberapa indikator yakni: Pertama, komunikasi yang meliputi transmisi komunikasi dinilai kurang baik, konsistensi komunikasi tergolong kurang baik, kejelasan komunikasi terkait informasi tergolong kurang baik. Kedua, sumber daya meliputi staf yang tersedia tergolong baik, informasi tergolong kurang baik, wewenang tergolong baik, fasilitas yang diperlukan tergolong kurang baik. Ketiga, sikap pelaksana meliputi tanggungjawab kerja yang cukup baik, dukungan terhadap kebijakan masih tergolong kurang baik. Keempat, struktur birokrasi meliputi *Standar Operating Procedure* (SOP) dinilai kurang baik, fragmentasi dalam hal pembagian tugas tergolong baik. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor penghambat seperti Komunikasi yang kurang optimal antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, Ketidaksesuaian Target dan Realisasi Luasan Tanam, Sumber daya yang kurang memadai dilihat dari keterbatasan infrastruktur, faktor pendukung meliputi Sumber daya manusia yang memadai.

Kata kunci: Implementasi, Program Perluasan Areal Tanam

ABSTRACT

Problems related to the implementation of the Planted Area Expansion Program (PAT) in Lampihong District, Balangan Regency include Mismatch between Target and Realized Planted Area, Inadequate resources, Less than optimal communication between farmers, government, and other stakeholders. The purpose of this study is to determine the implementation of the Planted Area Expansion Program (PAT) in Lampihong District, Balangan Regency and the factors that influence it. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Determination of informants by Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study concludes that the implementation of the Planted Area Expansion Program (PAT) in Lampihong District, Balangan Regency is classified as less than good seen from several indicators, namely: First, communication including communication transmission is considered less than good, communication consistency is classified as less than good, communication clarity related to information is classified as less than good. Second, resources including available staff are classified as good, information is classified as less than good, authority is classified as good, necessary facilities are classified as less than good. Third, the attitude of implementers including work responsibilities is quite good, support for policies is still classified as less than good. Fourth, the bureaucratic structure, including Standard Operating Procedures (SOPs), is considered inadequate, and fragmentation in terms of task allocation is considered good. Influencing factors include inhibiting factors such as suboptimal communication between farmers, the government, and other stakeholders, mismatches between targets and actual planted areas, and inadequate resources, as seen from limited infrastructure. Supporting factors include adequate human resources.

Keywords: Implementation, Planting Area Expansion Program

PENDAHULUAN

Pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam upaya mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian, salah satunya adalah Program Perluasan Areal Tanam (PAT). Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara maksimal serta meningkatkan produksi hasil pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Landasan hukum pelaksanaan program ini di tingkat nasional antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Lahan Pertanian.

Di tingkat provinsi, Kalimantan Selatan sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian yang besar turut berperan dalam mendukung program ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menetapkan kebijakan yang selaras dengan program nasional, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, berbagai program peningkatan kapasitas petani dan dukungan infrastruktur pertanian juga telah diterapkan untuk menunjang keberhasilan PAT.

Kabupaten Balangan, sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang cukup besar di Kalimantan Selatan, turut melaksanakan Program PAT yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Implementasi program ini diharapkan mampu meningkatkan luas lahan yang ditanami, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Kebijakan di tingkat kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pertanian di daerah tersebut.

Namun, dalam implementasinya, program ini menghadapi berbagai tantangan seperti ketersediaan lahan yang sesuai, akses petani terhadap sarana dan prasarana pertanian, serta faktor cuaca dan kondisi tanah yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Selain itu, efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program ini.

BSIP Kalimantan Selatan terus berupaya melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Penambahan Areal Tanam (PAT) di beberapa kecamatan di Kabupaten Balangan, seperti Batumandi, Lampihong, Halong, dan Awayan. Kegiatan ini melibatkan Penyuluh Pertanian di masing-masing wilayah untuk memastikan keberhasilan program dan memonitor secara tepat luas areal tanam yang sudah terealisasi. Proses pendampingan dan evaluasi difokuskan pada pemanfaatan teknologi geospasial menggunakan aplikasi ArcGIS Field Maps, yang didukung oleh database dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian.

Di Kabupaten Balangan, berbagai program telah dilaksanakan untuk mendukung Perluasan Areal Tanam (PAT) guna meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan. Berikut beberapa program utama yang telah diimplementasikan:

1. Pompanisasi Program ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan air irigasi, terutama di lahan tadah hujan dan rawa. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan pompa air kepada petani di Balangan sebagai bagian dari upaya mendukung PAT.
2. Optimalisasi Lahan Rawa Program ini fokus pada pemanfaatan lahan rawa yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian. Melalui kegiatan ini, lahan rawa diupayakan

dapat digunakan untuk menanam padi dan komoditas lainnya, sehingga meningkatkan luas tanam dan produksi.

3. Percepatan Tanam dan Penyediaan Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kalimantan Selatan dalam mempercepat proses tanam dan menyediakan sarana serta prasarana yang memadai untuk mendukung PAT.
4. Pembentukan Brigade La Nina Sebagai langkah antisipatif terhadap dampak perubahan iklim, khususnya fenomena La Nina, dibentuk Brigade La Nina yang bertugas dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan dampak banjir serta kekeringan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas produksi pertanian di tengah kondisi cuaca yang ekstrem.

Dalam implementasinya, target luasan lahan yang harus dilaporkan Kabupaten Balangan melalui poligon geospasial adalah sebesar 2.204 hektare. Namun, dalam dua hari pertama pendampingan, baru berhasil diidentifikasi seluas 1.126,3 hektare, atau sekitar 51,1% dari total target. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun perkembangan awal cukup baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dipantau secara ketat melalui proses evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi di lapangan.

Kecamatan Lampihong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 96,96 km², yang mencakup sekitar 5% dari total luas Kabupaten Balangan. Wilayah ini terdiri dari beberapa desa dengan karakteristik geografis yang sebagian besar berupa lahan pertanian dan perkebunan, menjadikannya sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar dalam sektor pertanian di Balangan.

Kecamatan Lampihong dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Balangan. Pada tahun 2023, luas tanam padi di kecamatan ini mencapai 4.867 hektare, dengan hasil produksi mencapai 22.800 ton. Sistem pertanian di daerah ini masih didominasi oleh metode tadah hujan, namun dalam beberapa tahun terakhir, inovasi pertanian seperti padi terapung mulai diterapkan untuk mengatasi tantangan banjir di lahan pertanian.

Berikut ini adalah target Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Realisasi di Kecamatan Lampihong:

Tabel 1. Target Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Realisasi

Tahun	Target PAT (ha)	Realisasi PAT (ha)	Persentase Capaian (%)
2022	5.000	2.800	56%
2023	5.200	2.750	53%
2024	5.400	2.600	48%
2025*	5.600	-	-

Sumber: BPS Kab. Balangan 2024

Pada tahun 2024, realisasi PAT di Kecamatan Lampihong mengalami penurunan lebih lanjut, hanya mencapai 2.600 hektare atau 48% dari target. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kondisi cuaca yang kurang mendukung, keterbatasan akses permodalan bagi petani, serta meningkatnya konversi lahan pertanian ke sektor non-pertanian.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus berupaya mengatasi kendala ini dengan berbagai program, seperti bantuan irigasi, pemberian subsidi pupuk, serta pelatihan teknologi

pertanian bagi petani. Diharapkan, strategi ini dapat meningkatkan pencapaian PAT di tahun mendatang.

Berdasarkan pengamatan penulis di terkait Penyelenggaraan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan tergolong belum optimal, hal tersebut dilihat dari beberapa aspek permasalahan yang ditemui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Target dan Realisasi Luasan Tanam, meskipun target perluasan areal tanam telah ditetapkan, realisasi di lapangan sering kali tidak sesuai akibat keterbatasan sumber daya seperti infrastruktur irigasi, akses permodalan bagi petani, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Misalnya, pada tahun 2024, dari target 5.400 hektare, realisasi yang tercapai hanya 2.600 hektare atau sekitar 48% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala signifikan dalam implementasi program perluasan areal tanam di Kecamatan Lampihong, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif dalam optimalisasi lahan pertanian.. (*Sumber : Observasi Penulis Bulan Maret 2025*).
2. Sumber daya yang kurang memadai dilihat dari keterbatasan infrastruktur irigasi dan kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi kendala utama dalam perluasan areal tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong. Sebagian besar lahan pertanian masih bergantung pada sistem tadah hujan, sementara jaringan irigasi yang ada belum mampu menjangkau seluruh area secara optimal. Curah hujan yang tinggi sering menyebabkan banjir dan merendam lahan pertanian, sedangkan pada musim kemarau, ketersediaan air menjadi sangat terbatas, menghambat pola tanam yang berkelanjutan. Kondisi ini menurunkan produktivitas pertanian dan menyebabkan realisasi PAT jauh di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur irigasi serta strategi mitigasi terhadap dampak perubahan iklim untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah ini. (*Sumber : Observasi Penulis Bulan Maret 2025*).
3. Komunikasi yang kurang optimal antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya seperti kurangnya pendampingan, keterlambatan penyampaian informasi terkait bantuan dan teknologi pertanian, serta minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dan petani menyebabkan banyak program tidak berjalan efektif. (*Sumber : Observasi Penulis Bulan Maret 2025*).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”**.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani No.Km.4 5, Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ([0526](tel:05262029499)) [2029499](tel:05262029499) Email: distan.balangankab@gmail.com.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (dalam Harbani Pasolong, 2013:161), penelitian kualitatif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk memahami situasi secara alami tanpa eksperimen, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi (kombinasi), analisis bersifat induktif, dan hasilnya menitikberatkan pada makna subjektif dibandingkan dengan generalisasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan total 12 informan. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

1. Komunikasi

Komunikasi, dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Oleh karena itu, syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami.

a. Transmisi

Transmisi komunikasi dalam Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong merupakan proses penting dalam penyampaian informasi antara pemerintah, penyuluh, dan petani. Meskipun saluran komunikasi sudah tersedia baik secara formal maupun informal, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti informasi yang tidak merata, bahasa teknis yang sulit dipahami, dan keterbatasan media komunikasi. Akibatnya, banyak petani tidak mendapatkan informasi secara tepat waktu, yang berdampak pada rendahnya efektivitas program. Untuk itu, diperlukan penguatan peran penyuluh, penggunaan teknologi komunikasi yang lebih optimal, serta penyusunan SOP komunikasi yang jelas agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.

Implementasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong masih menghadapi hambatan signifikan, terutama dalam aspek komunikasi dan koordinasi yang kurang optimal. Meskipun program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan luas tanam dan produksi pertanian, kelemahan dalam transmisi informasi, minimnya pendampingan teknis, serta terbatasnya keterlibatan masyarakat menyebabkan banyak petani belum merasakan manfaat maksimal dari program. Diperlukan penguatan sistem komunikasi dua arah, peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluh, serta upaya memperluas jangkauan informasi ke seluruh lapisan petani agar program PAT dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi pada Program Perluasan Areal Tanam (PAT) sangat penting untuk menjaga keselarasan informasi antara semua pihak yang terlibat, mulai dari dinas terkait, penyuluh, hingga petani. Konsistensi ini mencakup penyampaian pesan yang sama, berulang, dan mudah dipahami dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Pelaksanaan komunikasi dalam Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong kurang optimal dan belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh. Kelemahan utama terletak pada minimnya pendampingan teknis, keterlambatan dalam penyampaian informasi penting, dan tidak adanya pola komunikasi yang merata antara pemerintah, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat umum. Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi yang berdampak pada rendahnya partisipasi petani dan efektivitas program di lapangan. Untuk meningkatkan keberhasilan program, perlu adanya penguatan sistem komunikasi yang lebih terstruktur, peningkatan jumlah penyuluh aktif, serta penggunaan media komunikasi publik yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat.

c. Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi pada Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong merupakan faktor kunci dalam menjamin pemahaman yang tepat di antara para pihak yang terlibat, terutama antara pemerintah, penyuluh, dan petani. Komunikasi

Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong kurang optimal karena kendala komunikasi dan koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah, penyuluh, petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlambatan penyampaian informasi dan minimnya pendampingan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem komunikasi yang lebih cepat dan akurat serta penguatan koordinasi dan pendampingan agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani.

2. Sumber daya

Agar implementasi kebijakan efektif, maka sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, yakni: staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas.

a. Staf yang memadai

Staf yang memadai dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong merujuk pada ketersediaan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, yang cukup untuk menjalankan seluruh tahapan program.

Kondisi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam di Kecamatan Lampihong tergolong cukup optimal, terutama dari sisi keahlian dan kompetensi teknis. Petugas pertanian dan penyuluh sudah mampu memberikan pendampingan yang diperlukan oleh petani. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, diperlukan penambahan jumlah petugas dan peningkatan intensitas pendampingan agar seluruh petani mendapatkan perhatian yang cukup dan program dapat berjalan optimal.

b. Informasi

Informasi merupakan data atau pesan yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan memberikan pemahaman, pengetahuan, atau petunjuk untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Dalam konteks Program Perluasan Areal Tanam (PAT), informasi sangat penting sebagai bahan acuan bagi petani, penyuluh, dan pemerintah agar program dapat berjalan efektif dan efisien. Informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu membantu mengurangi kesalahan, mempercepat respon terhadap kendala di lapangan, serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Sumber daya informasi tergolong kurang optimal dan menjadi kendala serius dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong. Informasi yang tidak merata dan kurang terbuka menghambat pemahaman petani serta partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi komunikasi yang lebih sistematis, termasuk pemanfaatan media informasi cetak dan digital, serta peningkatan kapasitas penyuluh dalam menyebarkan informasi kepada seluruh stakeholder di wilayah tersebut.

c. Wewenang

Wewenang merupakan hak atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk mengambil keputusan, mengatur, dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi atau sistem. Dalam konteks Program Perluasan Areal Tanam (PAT), wewenang mengacu pada pembagian peran dan otoritas antara

pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pihak terkait lainnya untuk menjalankan fungsi masing-masing secara efektif dan terkoordinasi.

Wewenang dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong cukup optimal telah dibagi secara jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi antara dinas, penyuluh, dan kelompok tani berjalan cukup baik, dengan pembagian tugas yang spesifik. Namun, untuk menciptakan partisipasi publik yang lebih luas, perlu ada ruang keterlibatan bagi masyarakat umum dalam proses sosialisasi dan evaluasi kegiatan agar manfaat program bisa lebih inklusif dan berkelanjutan.

d. Fasilitas yang diperlukan

Fasilitas yang diperlukan adalah sarana dan prasarana pendukung yang mendukung kelancaran pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT). Fasilitas ini meliputi infrastruktur irigasi yang memadai untuk memastikan pasokan air yang cukup, alat dan mesin pertanian untuk membantu proses tanam dan panen, serta sarana komunikasi untuk memudahkan koordinasi antara petani, penyuluh, dan pemerintah.

Fasilitas yang tersedia masih kurang optimal dalam hal ketersediaan fasilitas penunjang. Keterbatasan irigasi, minimnya alat pertanian, dan kondisi cuaca yang tidak stabil menyebabkan proses perluasan tanam tidak berjalan optimal. Keberhasilan program sangat bergantung pada peningkatan sarana dan prasarana pertanian secara merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan pangan di daerah ini.

3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap perilaku), kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini:

a. Tanggungjawab

Tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sangat penting karena berhubungan langsung dengan keberhasilan dan efektivitas suatu program atau kebijakan.

Tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong cukup optimal telah berjalan sesuai ketentuan. Dinas, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat telah memainkan perannya masing-masing secara konsisten. Namun demikian, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pelaksanaan tugas secara terpisah, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang lebih kuat dan komunikasi yang intensif antar semua pemangku kepentingan.

b. Dukungan terhadap Kebijakan

Dukungan terhadap kebijakan adalah komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, kelompok tani, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan dan menyukseskan suatu kebijakan atau program.

Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong cukup optimal melalui penetapan target dan pelibatan berbagai pihak. Namun, keterbatasan infrastruktur, minimnya akses permodalan, serta faktor cuaca yang tidak menentu menyebabkan realisasi luasan tanam jauh dari target yang telah ditetapkan. Diperlukan pendekatan yang lebih realistis dan berbasis kondisi lapangan untuk memastikan

bahwa komitmen pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salahsatu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Dua faktor yang memungkinkan terhambat fungsi struktur birokrasi, yakni faktor internal, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar (*Standard Operating Procedures* – SOP) dan faktor eksternal, yakni fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, komite dalam legislative, interest group, pejabat-pejabat eksekutif dan faktor eksternal lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini:

a. *Standar Operating Procedure* (SOP)

Standar Operating Procedure (SOP) sangat penting dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) karena memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi setiap pihak yang terlibat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara konsisten.

SOP dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong tergolong kurang optimal karena belum tersedia sehingga menjadi salah satu faktor lemahnya koordinasi, keteraturan pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat. Ketiadaan pedoman teknis ini menyebabkan ketergantungan pada arahan individual dan minimnya standarisasi di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, pemerintah daerah perlu segera menyusun dan mensosialisasikan SOP yang jelas, praktis, dan aplikatif kepada seluruh pihak yang terlibat.

b. Fragmentasi

Fragmentasi dalam struktur birokrasi merujuk pada pembagian atau pemisahan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi atau sistem birokrasi yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi, komunikasi yang terhambat, dan pengambilan keputusan yang terpisah-pisah.

Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong telah terlaksana dengan cukup optimal. Setiap aktor, mulai dari pemerintah melalui dinas, penyuluh yang memberikan pendampingan teknis, hingga kelompok tani yang menjalankan program di lapangan, serta dukungan masyarakat, telah melaksanakan peran masing-masing secara optimal. Sinergi dan koordinasi yang kuat antar pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program, meskipun tetap dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk peningkatan monitoring dan evaluasi demi kemajuan program ke depannya.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

1. Faktor Penghambat

a. **Komunikasi yang kurang optimal antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya**

Komunikasi yang kurang optimal antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya seperti kurangnya pendampingan, keterlambatan penyampaian informasi terkait bantuan dan teknologi pertanian, serta minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dan petani menyebabkan banyak program tidak berjalan efektif.

Komunikasi yang tidak optimal menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong. Meskipun program telah dirancang, tanpa koordinasi yang baik dan pendampingan yang rutin, pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Diperlukan sistem komunikasi terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas penyuluh dan penggunaan media informasi yang lebih luas dan responsif

b. Ketidaksesuaian Target dan Realisasi Luasan Tanam

Ketidaksesuaian Target dan Realisasi Luasan Tanam, meskipun target perluasan areal tanam telah ditetapkan, realisasi di lapangan sering kali tidak sesuai akibat keterbatasan sumber daya seperti infrastruktur irigasi, akses permodalan bagi petani, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Misalnya, pada tahun 2024, dari target 5.400 hektare, realisasi yang tercapai hanya 2.600 hektare atau sekitar 48% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala signifikan dalam implementasi program perluasan areal tanam di Kecamatan Lampihong, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif dalam optimalisasi lahan pertanian. Untuk lebih jelasnya mengenai terbatasnya sumber daya manusia.

c. Sumber daya yang kurang memadai dilihat dari keterbatasan infrastruktur

Sumber daya yang kurang memadai dilihat dari keterbatasan infrastruktur irigasi dan kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi kendala utama dalam perluasan areal tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong. Sebagian besar lahan pertanian masih bergantung pada sistem tadah hujan, sementara jaringan irigasi yang ada belum mampu menjangkau seluruh area secara optimal.

2. Faktor Pendukung

a. Sumber daya manusia yang memadai

Sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong merujuk pada ketersediaan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, yang cukup untuk menjalankan seluruh tahapan program.

Kondisi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam di Kecamatan Lampihong tergolong memadai, terutama dari sisi keahlian dan kompetensi teknis. Petugas pertanian dan penyuluh sudah mampu memberikan pendampingan yang diperlukan oleh petani. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, diperlukan penambahan jumlah petugas dan peningkatan intensitas pendampingan agar seluruh petani mendapatkan perhatian yang cukup dan program berjalan optimal.

SIMPULAN

1. Implementasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tergolong kurang baik dilihat dari beberapa indikator yakni: Pertama, komunikasi yang meliputi transmisi komunikasi dinilai kurang baik karena keterlambatan informasi, konsistensi komunikasi tergolong kurang baik karena minimnya pendampingan teknis, kejelasan komunikasi terkait informasi tergolong kurang baik. Kedua, sumber daya meliputi staf yang tersedia tergolong baik dan memadai dilihat dari kemampuan teknis yang baik, informasi tergolong kurang baik

karena informasi sering hanya tersebar di kalangan kelompok tani tertentu, wewenang tergolong baik diketahui setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PAT memiliki wewenang yang jelas dan sudah diatur dalam kerangka kebijakan daerah, fasilitas yang diperlukan tergolong kurang baik seperti keterbatasan irigasi dan minimnya alat pertanian. Ketiga, sikap pelaksana meliputi tanggungjawab kerja yang cukup baik terlihat dari tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) telah berjalan sesuai ketentuan, Dukungan terhadap kebijakan masih tergolong kurang baik diketahui di lapangan masih banyak areal yang tidak optimal dimanfaatkan. Keempat, struktur birokrasi meliputi *Standar Operating Procedure* (SOP) dinilai kurang baik karena belum adanya SOP (Standar Operating Procedure) yang tertulis dan spesifik dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT), fragmentasi dalam hal pembagian tugas tergolong baik karena pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong telah terlaksana dengan baik.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan meliputi faktor penghambat seperti Komunikasi yang kurang optimal antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, Ketidakesesuaian Target dan Realisasi Luasan Tanam, Sumber daya yang kurang memadai dilihat dari keterbatasan infrastruktur, faktor pendukung meliputi Sumber daya manusia yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Anonim, 2018. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press. Makassar
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press
- Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Dunn, William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu. Yogyakarta
- Hasan, Muhammad, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. Penerbit Tahta Media Group
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administrais*, 9(2), pp. 26–33.
- Jati, Andri Kusuma. 2023. "Implementasi Program Petani Bangkit Guna Meningkatkan Pendapatan Petani Di Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan". Asdaf Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Program Studi Kebijakan Publik
- Kadji, Yulianto. 2015, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo: UNG Press
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media



- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Simatupang, Elfrida. 2021. "Implementasi Kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Era Pandemi COVID-19. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis
- Subarsono. AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*, Jakarta: FISIP UMB Pers
- Tim Penyusun Buku. 2023. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. STIA Amuntai. Edisi Revisi.